



Perbandingan Nilai Etika dan Moral dalam Budaya Timur dan Barat : Kajian Literatur

Wilda Robiah Salsabila^{1*}, Saranghe Kornesia Meilining Putri¹, Hiidayatul
Mardhiyyah Widyo Setyo Budi¹, Muhammad Arfi Andzir Haqiqi¹, Dimas
Abdillah¹, Alfa Brilian Ariyul Saputra¹, Ezyqi Zaahiru Havizh¹

¹ Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

Received: 2 November 2025
Revised: 14 November 2025
Accepted: 29 November 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan nilai-nilai etika dan moral dalam budaya Timur dan Barat melalui kajian literatur yang mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis komparatif terhadap berbagai sumber teoretis dan empiris yang relevan, termasuk literatur filsafat, kajian budaya, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penekanan nilai antara kedua budaya, di mana budaya Timur cenderung menekankan kolektivisme, harmoni sosial, penghormatan terhadap hierarki, serta tradisi. Sebaliknya, budaya Barat lebih menekankan individualisme, kebebasan pribadi, kesetaraan hak, dan rasionalitas. Meskipun berbeda, keduanya tetap menjunjung nilai-nilai moral universal seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Temuan ini memberikan wawasan penting mengenai bagaimana latar belakang budaya memengaruhi persepsi tentang benar dan salah, serta implikasinya dalam kehidupan sosial global. Studi ini relevan untuk memperkuat pemahaman lintas budaya di era globalisasi yang semakin kompleks.

Keywords: *Etika, Moral, Budaya Timur, Budaya Barat, Individualis*

(*) Corresponding Author: wildabela26@gmail.com

How to Cite: Salsabila, W., Putri, S., Budi, H., Haqiqi, M., Abdillah, D., Saputra, A., & Havizh, E. (2025). Perbandingan Nilai Etika dan Moral dalam Budaya Timur dan Barat : Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.C), 164-182. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13527>

PENDAHULUAN

Etika berasal dari kata *ethiek* (Belanda), *ethics* (Inggris), dan *ethos* (Yunani) yang berarti kebiasaan atau kelakuan. Etika berkaitan dengan filsafat, nilai, dan moral, serta berfokus pada persoalan baik dan buruk. Dalam bentuk jamak, ta etha berarti adat kebiasaan, yang menjadi dasar pengertian etika menurut Aristoteles. Etika merupakan ilmu tentang kebiasaan atau perbuatan manusia yang dinilai dari segi moral. Ia membantu menentukan apakah suatu tindakan dapat dikatakan baik atau buruk. Etika juga menghasilkan aturan atau pola tingkah laku berdasarkan akal budi manusia. Dalam masyarakat, etika berperan dalam menilai baik buruknya pergaulan dan perilaku. Istilah "susila" dalam bahasa Sanskerta juga menunjukkan prinsip hidup yang baik dan bermoral. Etika tidak mengajarkan secara langsung, tetapi mengkaji nilai, norma, dan pandangan moral secara kritis. Secara umum, etika berasal dari filsafat yang membahas idealisme moral dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Himmawan *et al.*, 2024).

Moral atau moralitas berasal dari bahasa Latin, yaitu *mos* untuk tunggal dan *mores* untuk jamak, memiliki makna kelakuan, kesusilaan, atau kebiasaan. Bentuk kata lainnya, *moralis*, juga berkaitan dengan perilaku atau adat yang dianggap baik dalam suatu masyarakat. Terdapat juga istilah *amoral* yang berarti tidak memiliki moral yakni individu yang tidak mempunyai nilai positif di mata manusia lainnya. Moral memiliki dua makna utama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertama, moral diartikan sebagai ajaran tentang baik dan buruk yang secara umum diterima berkaitan dengan sikap, perbuatan, perilaku manusia dan kewajiban. Kedua, moral merujuk pada kondisi mental atau batin seseorang yang mendorong seseorang melakukan suatu tindakan tertentu. Moral juga dapat dilihat sebagai cerminan dari isi hati atau perasaan yang terwujud melalui tindakan nyata. Suseno (1998) menegaskan bahwa moralitas adalah cara untuk mengukur nilai seseorang sebagai warga negara dan individu. Pada saat yang sama, pendidikan moral berusaha untuk menanamkan moralitas dan kasih sayang pada anak-anak muda. Sebaliknya, moralitas didefinisikan oleh Ouska dan Whellan (1997) sebagai konsep baik dan jahat yang melekat pada kodrat manusia dan ada di dalam individu. Moralitas masih berada dalam seperangkat hukum meskipun ada di dalam diri seseorang. Karena etika adalah atribut dari penilaian yang baik dan moralitas adalah konsep baik dan jahat, tidak ada perbedaan antara keduanya. Oleh karena itu, cara orang-orang yang bermoral mengikuti dan menghormati hukum mengungkapkan esensi dan makna moralitas. Etika dan akhlak adalah istilah lain yang memiliki kemiripan dengan moral. Namun, meskipun sering digunakan secara bergantian, ketiganya memiliki perbedaan dalam ruang lingkup dan pendekatannya. (Arrafi *et al.*, 2023);(Febriyanti dan Dewi, 2021).

Akhlik berasal dari bahasa Arab yang berarti moral, karakter, perilaku, atau disposisi, dari kata *khuluq*, yang merupakan bentuk jamak dari *khuluqun*. Budi pekerti dalam bahasa Indonesia merupakan kata majemuk, berasal dari kata budi dan pekerti. Istilah Sansekerta "budi" menyiratkan "kesadaran," "perhatian," atau "cara untuk menyadari." Pekerti, di sisi lain, berarti perilaku. Istilah "moral" dan "akhlak" sering digunakan secara bergantian. Ini berbeda dengan intelegensi, yang menunjukkan derajat keterampilan, kelicikan, atau kecerdasan. Untuk menggambarkan perilaku baik atau buruk, tata krama, dan kesesuaiannya dengan cita-cita hidup, istilah "moral" atau "akhlak" digunakan. Etika, moral, dan akhlak merupakan tiga konsep yang sering digunakan dalam membahas perilaku manusia, namun ketiganya memiliki perbedaan mendasar. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan norma tentang baik dan buruk berdasarkan pemikiran rasional dan logis. Moral berkaitan dengan aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan diterima secara umum sebagai pedoman perilaku. Sementara itu, akhlak bersumber dari ajaran agama, yang menekankan pada sikap dan perbuatan seseorang berdasarkan hati nurani dan nilai-nilai ketuhanan. Secara singkat, etika bersifat teoritis dan filosofis, moral bersifat sosial dan kontekstual, sedangkan akhlak bersifat spiritual dan religius. Dapat dikaakan etika lebih bersifat filosofis dan rasional, sedangkan moral lebih praktis dan berkaitan dengan nilai sosial yang hidup di masyarakat. Akhlak sendiri biasanya dikaitkan dengan nilai-nilai agama dan norma keagamaan dalam menilai perilaku manusia (Mu'thi dan Abdul, 2023).

Masyarakat dunia secara umum terbagi menjadi dua kluster budaya, yaitu Barat dan Timur, bukan semata berdasarkan letak geografis, tetapi karena faktor historis, psikologis, dan kultural. Masyarakat Barat, yang banyak tersebar di Eropa dan Amerika, menekankan rasionalitas, logika, dan kemajuan material. Mereka mengedepankan demokrasi, kebebasan berekspresi, dan penguasaan teknologi, serta memandang filsafat dan agama sebagai gagasan abstrak tanpa keterikatan praktis. Sebaliknya, masyarakat Timur yang mencakup Asia dan sebagian Afrika Utara menjunjung tinggi norma-norma yang bersumber dari agama dan nilai kebijaksanaan. Budaya Timur cenderung berorientasi pada rasa, intuisi, simbolisme, dan harmoni sosial. Kolonialisme juga berperan dalam membentuk orientasi budaya di berbagai wilayah seperti Afrika dan Australia, yang secara historis mengikuti budaya Barat. Perpaduan atau pergeseran budaya akibat transmigrasi, kolonialisasi, atau globalisasi menciptakan sub-budaya baru yang mengaburkan batas antara nilai-nilai Timur dan Barat. Sub-kelompok ini menunjukkan bahwa dalam praktik sosial dan komunikasi global, perbedaan budaya mayoritas sering kali melebur dalam dinamika lintas budaya. Penting memahami kedua budaya ini secara komprehensif untuk mendukung interaksi global yang lebih harmonis (Yu *et al.*, 2022); (Ji *et al.*, 2021).

Etika dan moral merupakan landasan penting dalam membentuk perilaku individu serta tatanan masyarakat yang harmonis (Efendi, 2021). Dalam berbagai konteks budaya, nilai-nilai ini dapat memiliki pengertian, bentuk, dan penerapan yang berbeda. Budaya Timur dan Barat sebagai dua kutub peradaban besar di dunia menyimpan perbedaan mendasar dalam memandang konsep baik dan buruk, benar dan salah. Budaya Timur umumnya dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme, Taoisme, Hindu, dan Budhisme, yang menekankan kolektivisme, harmoni sosial, serta penghormatan terhadap hierarki dan tradisi. Sementara itu, budaya Barat dibentuk oleh filsafat Yunani, pemikiran Kristen, dan era Pencerahan Eropa, yang menjunjung tinggi individualisme, kebebasan pribadi, kesetaraan hak, dan logika rasional. Dalam era globalisasi saat ini, interaksi lintas budaya semakin intensif dan kompleks, sehingga penting untuk memahami bagaimana perbedaan nilai etika dan moral ini berperan dalam membentuk komunikasi, kerja sama, dan resolusi konflik. Kajian ini menjadi relevan karena mampu memberikan perspektif baru yang lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan nilai budaya. Dengan memahami kedua perspektif tersebut, diharapkan tercipta ruang dialog etis yang lebih inklusif di tengah dinamika multikulturalisme global. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana perbedaan nilai etika dan moral antara budaya Timur dan Barat, serta bagaimana implikasinya dalam konteks sosial modern. Tujuan utama kajian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan nilai-nilai etika dalam dua budaya besar ini sebagai upaya membangun pemahaman lintas budaya yang lebih mendalam (Kusumastuti *et al.*, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur untuk menganalisis dan membandingkan nilai-nilai etika dan moral dalam budaya Timur dan Barat. Sumber data yang digunakan mencakup berbagai literatur akademik seperti jurnal ilmiah, buku filsafat, dan

artikel hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri referensi yang secara langsung membahas konsep etika dan moral dalam perspektif budaya, baik secara filosofis maupun empiris. Analisis dilakukan melalui pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan nilai-nilai utama dalam kedua budaya. Peneliti menyoroti tema-tema kunci seperti kolektivisme vs. individualisme, nilai tradisional vs. rasionalitas modern, serta prinsip moral universal seperti keadilan dan kejujuran. Proses interpretasi hasil difokuskan pada pemahaman bagaimana latar belakang budaya memengaruhi penilaian moral dan etis masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi implikasi praktis dari hasil perbandingan dalam konteks globalisasi dan interaksi antarbudaya. Dengan demikian, metode ini tidak hanya memberikan kerangka teoretis, tetapi juga mendukung pemahaman lintas budaya yang lebih mendalam terhadap perbedaan etika dan moral di masyarakat Timur dan Barat.

PEMBAHASAN

Teori Etika Deontologi

Bertentangan dengan teori-teori etika yang didasarkan pada gagasan inti untuk memperoleh sejumlah kondisi hubungan yang baik atau sifat karakter yang diperlukan untuk kehidupan yang layak, deontologi, menurut Kamus Filsafat, adalah etika yang berpusat pada konsep kewajiban (Blackburn, 2013). Ilmu ini memeriksa kewajiban, persyaratan hukum moral, dan gagasan kewajiban secara umum sebagai kebutuhan sosial yang khas secara etis (Bagus, 2005). Karena seseorang tidak dapat sampai pada inti etika dengan menggunakan akal untuk merumuskannya, Kant berargumen bahwa etika bukanlah masalah akal murni yang teoretis atau rasional. Karena ini akan mendorong seseorang untuk menghitung untung dan rugi, etika rasional tidak lagi etis. Etika, menurut Kant, Kant berpendapat bahwa akal praktis mengatur etika. Dengan kata lain, prinsip moral pada dasarnya adalah kewajiban yang tertanam dalam diri manusia. Pada kenyataannya, orang secara alami cenderung untuk berbuat baik. Pada dasarnya, setiap tindakan yang diambil orang hanya berfungsi untuk memperkuat kecenderungan bawaan mereka (Abdullah *et al.*, 2002).

Immanuel Kant dianggap sebagai seorang pendukung etika deontologis dalam bidang filosofi etika. Menurut teori filosofi moral dari etika deontologis, sebuah tindakan adalah benar jika itu didorong oleh niat baik atau jika itu mematuhi norma kewajiban yang berlaku. Di sini, 'baik' mengacu pada kebajikan dari niat semata, terlepas dari semua faktor lainnya. Akibatnya, etika deontologis sangat menekankan pada motif aktor dan niat baik (Bertens, 2013). Kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab seseorang adalah ungkapan dari niat baik. Ini telah mengkonfirmasi bahwa ada dorongan dalam hati nurani, yang berarti bahwa manfaat atau kerugian dari suatu kegiatan tidak dipertanyakan. Ini menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai moralitas jika mereka bertindak sesuai dengan kewajiban moral yang dipandu oleh hati nurani mereka. Menurut Kant, kewajiban adalah kebutuhan untuk bertindak sesuai dengan hukum, terlepas dari apakah itu membuat kita nyaman, puas, atau tidak pantas; tetap merupakan tanggung jawab seseorang untuk melaksanakan tindakan mereka, yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tanpa syarat. Misalnya, seorang pengemudi kendaraan bermotor yang terburu-buru untuk sampai ke suatu tempat karena

keadaan darurat. Lampu lalu lintas yang mereka temui di jalan berwarna merah, yang berarti bahwa semua mobil diharuskan untuk berhenti. Meskipun berada dalam situasi yang genting dan perlu segera mencapai tujuan, pengemudi akhirnya berhenti karena tuntutan kebaikan dari hati nurani mereka; inilah yang disebut Immanuel Kant sebagai moralitas.

Sebuah tindakan dianggap baik ketika dilaksanakan sesuai dengan tuntutan hati nurani dan aturan moral yang dominan, bukan karena menghasilkan hasil yang menguntungkan dan baik. Perilaku semacam itu tidak didasarkan pada informasi yang dipelajari sebelumnya; sebaliknya, mereka muncul secara alami. Niat baik, atau tekad untuk mempertahankan prinsip moral dan menghindari kecenderungan egois, adalah satu-satunya kebajikan di dunia ini (Suseno, 1997). 'Jangan melanggar' dan 'bertindak sesuai dengan aturan' adalah dua contoh etika deontologis. Ini adalah tindakan yang harus diikuti terlepas dari konsekuensinya, sehingga harus dilakukan tanpa pemikiran sebelumnya. Semua manusia yang wajar terikat oleh hukum moral. Kant berpendapat bahwa moralitas akan hancur jika kewajiban moral dihubungkan dengan moralitas baik dan buruk. Ketika seseorang ingin melakukan kebaikan, mereka tidak seharusnya mengharapkan imbalan apa pun dan hanya harus termotivasi oleh hati nurani mereka. Ini dikenal sebagai motif tersembunyi. Menurut Kant, seorang individu yang mematuhi hukum moral melakukannya karena kewajiban atau niat baik. Perilaku mementingkan diri sendiri, yang menganggap bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus menguntungkan dan memuaskan bagi diri sendiri, bisa bersifat positif atau negatif.

Sebagai hasilnya, cinta sebagai kecenderungan sederhana menimbulkan tindakan. Kant percaya bahwa tindakan yang bermaksud baik akan selalu baik dan tidak akan pernah menjadi buruk. Ini berarti bahwa tindakan tersebut akan terwujud dalam kehendak yang tak bersyarat, melainkan kehendak yang menguntungkan secara universal. Bahkan jika suatu tindakan pada akhirnya mengarah kepada sesuatu yang negatif karena ketidakakuratan kemungkinan yang berada di luar kehendak agen, tindakan tersebut tetap moral jika dimotivasi oleh kehendak moral yang rasional dan dilakukan dengan tujuan memenuhi kewajiban serta melakukan apa yang benar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tindakan dan kegiatan yang secara moral benar dan dimaksudkan untuk menjadi secara moral benar didasarkan pada tanggung jawab (Graham, 2014). Untuk mengetahui suatu tindakan itu berasal dari kehendak baik adalah melalui dialektika transendental yang harus benar-benar bersifat a priori, asal-usul proses memperoleh pengetahuan tertentu yang ditarik dari isi hati nurani dan asal-usul konsepsi tertentu yang dapat disimpulkan (Kant dan Abdullah, 2017). Telah diketahui bahwa deontologi Kant menawarkan keyakinan bahwa prinsip-prinsip moral selalu didasarkan pada kualitas inheren dari suatu tindakan daripada pada sumber eksternal (Fautanu, 2012). Kant sepenuhnya memisahkan moralitas dari hasil perbuatan. Konsekuensi dari suatu aktivitas tidak boleh dipertimbangkan karena sebuah tindakan pasti akan memiliki efek. Sebuah tindakan dianggap baik karena hanya didasarkan pada niat baik, bukan karena hasilnya.

Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme adalah teori etika teleologis yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18 dan disempurnakan oleh John Stuart Mill.

Teori ini menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya terhadap kebahagiaan atau manfaat. Prinsip utamanya adalah "*the greatest happiness for the greatest number*," yaitu kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Bentham lebih bersifat kuantitatif berdasarkan intensitas, durasi, kepastian, kecenderungan untuk menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar di masa depan, propinquity (kedekatan waktu), kemurnian, dan intensitas yang berhubungan dengan setiap tindakan, sedangkan Mill menambahkan unsur kualitas dalam kebahagiaan. Dalam budaya Barat yang pragmatis dan rasional, utilitarianisme banyak diterapkan dalam kebijakan publik dan pengambilan keputusan etis. Misalnya, keputusan medis atau ekonomi yang mengorbankan sedikit demi manfaat besar bagi banyak orang. Teori ini menekankan hasil akhir, bukan proses atau niat. Utilitarianisme juga digunakan dalam analisis etika bisnis dan pemerintahan. Kelemahan teori ini adalah potensi mengabaikan hak individu demi kepentingan mayoritas. Meski begitu, pemikiran ini banyak mempengaruhi cara berpikir Barat dalam mengukur moralitas secara fungsional (Rosita *et al.*, 2024): (Safudin *et al.*, 2022).

Dari pilihan individu hingga kebijakan negara yang rumit, utilitarianisme diterapkan dalam banyak aspek kehidupan manusia. Secara pribadi, orang sering mengevaluasi bagaimana tindakan akan mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan mereka menggunakan konsep utilitarian. Misalnya, seseorang mungkin mempertimbangkan manfaat kesehatan jangka panjang saat memilih antara makanan buruk dan makanan sehat. Demikian pula, aspek-aspek seperti bagaimana pekerjaan mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan secara umum akan diperhitungkan saat memilih karir, selain pertimbangan moneter. Keputusan yang berdampak pada banyak orang dibuat di tingkat kebijakan publik menggunakan prinsip utilitarian (Sos, 2020). Misalnya, keuntungan keseluruhan dari mengurangi penyakit menular dan meningkatkan kesejahteraan populasi adalah dasar bagi kekhawatiran kesehatan masyarakat tentang vaksinasi dan inisiatif kesehatan lainnya. Demikian pula, penggunaan sumber daya dan strategi pembangunan harus dievaluasi untuk dampak jangka panjangnya terhadap keberlanjutan dan lingkungan. Misalnya, keuntungan keseluruhan dari mengurangi penyakit menular dan meningkatkan kesejahteraan populasi adalah dasar bagi kekhawatiran kesehatan masyarakat tentang vaksinasi dan inisiatif kesehatan lainnya. Demikian pula, penggunaan sumber daya dan strategi pembangunan harus dievaluasi untuk dampak jangka panjangnya terhadap keberlanjutan dan lingkungan (Rahman dan Maulana, 2023).

Dalam konteks etika bisnis, utilitarianisme membantu organisasi dalam mempertimbangkan bagaimana barang dan jasa mereka mempengaruhi kesejahteraan dan kepuasan pelanggan mereka (Dzulfikri Azis Muthalib *et al.*, 2023). Mengingat risiko dan potensi imbalance, analisis utilitarian sangat berguna untuk mengambil keputusan strategis tentang pengembangan produk atau ekspansi perusahaan (Kristanti *et al.*, 2023). Namun, terkadang ada kesulitan dalam menerapkan utilitarianisme. Salah satu argumen menentang penggunaannya adalah bahwa sulit untuk mengukur utilitas secara objektif karena orang dan kelompok yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda tentang apa itu kebahagiaan dan kepuasan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa terlalu fokus pada keberhasilan finansial secara keseluruhan dapat menutupi prinsip moral yang

mungkin lebih penting atau hak individu yang perlu dipertimbangkan saat mengambil keputusan.

Etika Kebajikan(Aristoteles)

Etika kebajikan atau *virtue ethics* dikembangkan oleh Aristoteles sebagai pendekatan etika yang menekankan karakter dan kebiasaan baik. Menurut Aristoteles, moralitas bukan hanya soal aturan atau hasil, tetapi soal membentuk pribadi yang baik melalui praktik kebajikan dan kebijaksanaan praktis seharusnya didasarkan pada akal budi dan kebebasan manusia, dan bukansekedar kepatuhan terhadap peraturan atau perintah ilahi. Kebajikan berada di tengah antara dua ekstrem, seperti keberanian yang berada antara ketakutan dan nekat. Etika kebajikan memandang bahwa kebahagiaan (*eudaimonia*) adalah tujuan hidup manusia dan dicapai melalui kebajikan yang konsisten. Dalam pendekatan ini, penting untuk membangun kebiasaan baik sejak dini agar menjadi bagian dari karakter. Etika kebajikan sangat relevan dalam masyarakat yang menghargai integritas pribadi dan keseimbangan dalam hidup. Berbeda dari deontologi dan utilitarianisme, etika kebajikan lebih menekankan aspek batin dan motivasi jangka panjang. Aristoteles percaya bahwa pendidikan moral sangat penting dalam pembentukan karakter warga negara. Budaya Timur, khususnya dalam filsafat Konfusianisme, memiliki kemiripan dengan etika kebajikan. Oleh karena itu, teori ini menjadi titik temu antara dua pendekatan budaya dalam memahami etika (Silalahi, 2025).

Etika Konfusianisme, Buddhisme, dan Islam (Budaya Timur)

Etika dalam budaya timur banyak dipengaruhi oleh ajaran agama dan filsafat lokal seperti Konfusianisme, Buddhisme, dan Islam. Konfusianisme menekankan harmoni sosial, penghormatan terhadap hierarki, dan pentingnya peran keluarga dalam pembentukan moral. Buddhisme mempromosikan welas asih, kesadaran diri, dan pelepasan dari nafsu sebagai jalan menuju kebajikan. Etika Islam menekankan tanggung jawab individu kepada Tuhan dan sesama, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiganya memiliki kesamaan dalam menghargai relasi sosial dan spiritualitas sebagai dasar moral. Etika Timur lebih bersifat kolektif dan relasional, tidak menekankan individualisme seperti dalam banyak teori Barat. Ajaran-ajaran ini membentuk pola pikir yang lebih menyatu antara kehidupan pribadi dan sosial. Dalam budaya Timur, etika bukan hanya aturan rasional, tetapi juga bagian dari identitas kultural dan religius. Norma dipelihara melalui tradisi dan penghormatan terhadap otoritas moral. Oleh karena itu, perbandingan Etika Timur dan Barat mencerminkan perbedaan paradigma yang mendalam. Pemahaman terhadap etika Timur penting agar tidak menilai budaya lain dari kacamata Barat semata (Fadliana *et al.*, 2024).

Konsep Budaya (Hofstede)

Geert Hofstede mengembangkan teori dimensi budaya yang sangat berpengaruh dalam memahami perbedaan nilai antar budaya. Ia mengidentifikasi beberapa dimensi budaya, antara lain individualisme vs kolektivisme, *power distance*, *uncertainty avoidance*, dan *masculinity vs femininity*. Dalam konteks perbandingan Timur dan Barat, dimensi individualisme dan kolektivisme sangat penting. Budaya Barat cenderung individualis, menekankan kebebasan pribadi, otonomi, dan pencapaian individu. Sebaliknya, budaya Timur cenderung kolektivistis, mengedepankan keharmonisan kelompok, loyalitas, dan kepentingan

bersama. Dimensi power distance juga menunjukkan perbedaan sikap terhadap hierarki dan otoritas. Budaya Timur lebih menerima kesenjangan kekuasaan sebagai hal yang wajar, sementara budaya Barat cenderung mendorong kesetaraan dan kritik terhadap kekuasaan. Hofstede menekankan bahwa nilai-nilai ini terbentuk secara historis dan kontekstual, sehingga tidak bisa dipaksakan menjadi satu standar global. Teori Hofstede membantu menjelaskan mengapa pendekatan terhadap etika dan moral bisa berbeda di antara dua budaya. Kerangka ini menjadi dasar kuat dalam menganalisis bagaimana sistem nilai berkembang dalam konteks sosial masing-masing budaya (Wardhani *et al.*, 2024).

Teori Relativisme Budaya & Universalisme Moral

Relativisme budaya adalah pandangan bahwa nilai moral bersifat kontekstual dan tergantung pada budaya masing-masing. Menurut teori ini, tidak ada standar moral universal yang berlaku untuk semua masyarakat. Apa yang dianggap benar di satu budaya bisa dianggap salah di budaya lain, dan sebaliknya. Pandangan ini mendukung toleransi budaya dan menolak penghakiman moral lintas budaya. Sebaliknya, universalisme moral berpendapat bahwa ada nilai-nilai dasar yang berlaku secara global, terlepas dari budaya yang ada. Contohnya adalah hak asasi manusia, keadilan, dan larangan terhadap pembunuhan. Pendekatan universal sering dikritik karena dianggap sebagai bentuk kolonisasi nilai-nilai Barat. Namun, para pendukungnya menegaskan bahwa ada prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung tinggi demi martabat kemanusiaan. Dalam konteks kajian etika Timur dan Barat, kedua pandangan ini penting untuk dipertimbangkan secara seimbang. Perdebatan antara relativisme dan universalisme membantu kita memahami batas-batas penerapan nilai moral dalam masyarakat global yang beragam (Andini, 2022).

Karakteristik Nilai Etika dan Moral dalam Budaya Timur

Etika dan moral dalam budaya Timur banyak bersumber dari tradisi, agama, dan adat istiadat yang sudah diwariskan turun-temurun. Ajaran Islam, Hindu, Buddha, dan Konfusianisme memberikan fondasi moral yang kuat dalam masyarakat Timur. Agama tidak hanya menjadi panduan spiritual, tetapi juga pedoman sosial dalam menentukan benar dan salah. Tradisi menjadi alat utama dalam mentransmisikan nilai-nilai tersebut dari keturunan ke keturunan selanjutnya. Misalnya, dalam masyarakat Hindu, konsep dharma mengatur kewajiban moral berdasarkan status sosial. Dalam ajaran Buddha, nilai-nilai welas asih dan ketenangan batin menjadi dasar etika. Konfusianisme di Tiongkok menekankan hubungan sosial yang harmonis dan kewajiban moral antaranggota keluarga. Selain itu, adat istiadat yang khas di masing-masing wilayah turut memperkuat pemaknaan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, nilai-nilai moral Timur dibentuk oleh perpaduan antara warisan budaya dan ajaran spiritual yang terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini bersifat kolektif dan cenderung tetap serta mengikat dalam kehidupan sosial (Bernanda dan Wakhudin, 2023).

Ciri menonjol dalam budaya Timur adalah kolektivisme, yakni mendahulukan kepentingan kelompok dibanding kepentingan individu. Dalam sistem ini, keluarga, komunitas, atau bangsa sering kali dipandang lebih penting daripada aspirasi pribadi. Nilai-nilai seperti kesetiaan, kerja sama, dan pengorbanan demi kelompok sangat dijunjung tinggi. Konsep diri seseorang

dibentuk dari perannya dalam kelompok, bukan dari pencapaian pribadi. Kolektivisme menciptakan rasa tanggung jawab sosial dan solidaritas yang kuat dalam masyarakat Timur. Misalnya, dalam budaya Jepang, keputusan sering diambil melalui konsensus untuk menjaga keharmonisan kelompok. Pengambilan keputusan yang individualistis sering dianggap mengganggu tatanan sosial. Selain itu, tekanan sosial juga lebih besar karena masyarakat mengawasi perilaku anggota kelompoknya. Identitas pribadi sering kali tidak bisa dipisahkan dari identitas sosial. Hal ini menjadikan masyarakat Timur cenderung menghargai kepatuhan dan keterikatan pada norma kelompok (Suastra *et al.*, 2024);(Adi, 2021).

Masyarakat Timur sangat menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial dan keselarasan dalam hubungan antar manusia. Kehidupan sosial dianggap ideal ketika terdapat kedamaian, keteraturan, dan saling menghormati. Oleh karena itu, tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik atau perpecahan sangat dihindari. Konsep “malu” dan “rasa sungkan” banyak digunakan untuk mengatur perilaku agar tidak melanggar batas kesopanan. Harmoni dianggap lebih penting daripada menegakkan kebenaran secara individual. Hal ini terlihat dalam gaya komunikasi yang tidak langsung, penuh kesantunan, dan menghindari konfrontasi. Ajaran Konfusianisme juga mendorong terciptanya tatanan sosial yang seimbang dan harmonis melalui peran sosial yang dijalankan secara bertanggung jawab. Dalam masyarakat Asia Timur, keberhasilan dalam hidup tidak hanya diukur dari prestasi pribadi, tetapi juga dari kemampuan menjaga hubungan sosial yang baik. Dengan menjaga harmoni, masyarakat Timur berusaha menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan. Etika dalam budaya ini berorientasi pada kesatuan, ketertiban, dan keseimbangan (Alamin, 2021).

Penghormatan terhadap hierarki dan otoritas adalah ciri utama dalam etika budaya Timur. Dalam hubungan sosial, status dan usia sangat menentukan bentuk interaksi dan tanggung jawab moral seseorang. Konsep filial piety (bakti anak kepada orang tua) dalam budaya Tionghoa adalah contoh konkret nilai ini. Masyarakat diajarkan sejak dini untuk menghormati orang tua, guru, dan pemimpin sebagai simbol kebijaksanaan dan pengalaman. Penghormatan ini bukan hanya sopan santun, tetapi juga bagian dari sistem nilai yang terstruktur. Dalam budaya Jepang, senpai–kohai (atasan–junior) adalah bentuk relasi yang menekankan penghargaan terhadap hierarki. Pengambilan keputusan pun sering dipengaruhi oleh status sosial, bukan semata-mata keahlian. Norma ini menjaga ketertiban sosial dan memperkuat loyalitas dalam kelompok. Individu dianggap bermoral ketika dapat menjalankan perannya sesuai dengan hierarki sosial yang berlaku. Dengan demikian, etika Timur sangat menghargai struktur sosial yang tertata dan stabil (Kami *et al.*, 2025).

Etika dalam budaya Timur sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan religius. Moralitas tidak hanya diukur dari aspek rasional, tetapi juga dari keyakinan spiritual yang bersumber dari ajaran agama. Dalam Islam, misalnya, nilai moral mengacu pada syariat yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Dalam Hindu dan Buddha, moralitas berkaitan erat dengan karma dan pembebasan jiwa. Konfusianisme juga mengajarkan bahwa kehidupan yang bermoral adalah kehidupan yang selaras dengan kehendak langit dan tata sosial. Spiritualitas dalam budaya Timur menciptakan kedalaman makna dalam setiap tindakan manusia.

Moralitas bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian dari perjalanan hidup untuk mencapai kebijaksanaan. Nilai-nilai seperti kasih sayang, pengendalian diri, dan kesederhanaan menjadi landasan dalam berperilaku. Dengan demikian, etika di Timur membentuk integrasi antara spiritualitas dan praktik sosial. Hal ini menjadikan moralitas sebagai bagian dari penghayatan hidup, bukan sekadar aturan eksternal (Rizki, 2024).

Contoh-contoh praktik etika Timur dapat ditemukan dalam berbagai budaya Asia yang masih melestarikan nilai-nilai tradisional. Di Jepang, kode etik Bushido mengajarkan keberanian, kehormatan, kesetiaan, dan tanggung jawab sebagai nilai utama. Selain itu, kesopanan dan penghormatan dalam komunikasi menjadi standar sosial yang sangat dijunjung tinggi. Di Tiongkok, konsep filial piety mewajibkan anak-anak untuk menghormati, merawat, dan menaati orang tua serta leluhur. Tradisi ini tidak hanya berlaku dalam keluarga, tetapi juga dalam tatanan masyarakat dan pemerintahan. Sementara itu, di Indonesia, nilai gotong royong mencerminkan semangat kolektivisme dan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Musyawarah juga menjadi praktik penting dalam pengambilan keputusan, yang menekankan kesepakatan bersama. Semua contoh ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral di Timur diinternalisasi melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Timur menjadikan nilai-nilai ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Praktik-praktik ini berfungsi sebagai pedoman etika yang memelihara keteraturan dan keharmonisan sosial.

Karakteristik Nilai Etika dan Moral dalam Budaya Barat

Etika dan moral dalam budaya Barat memiliki akar yang kuat pada tradisi rasionalitas dan pemikiran filsafat klasik. Filsafat Yunani-Romawi, seperti ajaran Socrates, Plato, dan Aristoteles, menjadi dasar konseptual dalam membedakan yang baik dan buruk secara logis. Selain itu, pengaruh hukum Romawi memberikan struktur sistematis terhadap aturan sosial dan moral yang berlaku di masyarakat. Di era modern, nilai-nilai ini berkembang dalam konteks hukum sekuler yang terlepas dari ajaran agama. Ajaran Kristen turut membentuk nilai moral, tetapi telah mengalami proses sekularisasi dalam kehidupan publik. Rasionalitas menjadi alat utama dalam menetapkan nilai moral, yang dipahami secara universal dan objektif. Penalaran logis, debat terbuka, dan analisis kritis menjadi cara utama dalam menyelesaikan persoalan etika. Moral Barat menekankan konsistensi prinsip dan argumentasi rasional dalam pengambilan keputusan. Dengan latar belakang ini, moralitas di budaya Barat berkembang sebagai sistem yang berbasis pada hukum dan akal budi. Oleh karena itu, nilai etika cenderung bersifat eksplisit, tertulis, dan formal.

Ciri utama dalam etika Barat adalah individualisme, yaitu penghargaan tinggi terhadap hak dan kebebasan pribadi. Setiap individu dianggap sebagai entitas otonom dimana mempunyai hak untuk menentukan arah hidupnya tanpa campur tangan orang lain atau sendiri. Kebebasan dalam berpikir, berbicara, dan bertindak dipandang sebagai hak mendasar yang tidak boleh dikekang. Dalam masyarakat Barat, martabat individu dijunjung tinggi melebihi kepentingan kolektif. Hak untuk berbeda pendapat dan membuat pilihan pribadi menjadi fondasi dalam struktur sosial dan politik. Pendidikan dan sistem hukum didesain untuk melindungi kebebasan ini agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Konsep privasi, kepemilikan pribadi, dan kebebasan berekspresi adalah

bagian integral dari nilai moral. Individu dinilai dari kemampuannya mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, masyarakat Barat cenderung mendorong keberanian untuk mengekspresikan diri dan mengejar tujuan pribadi. Individualisme ini dianggap sebagai dasar dari kemajuan dan inovasi dalam berbagai bidang kehidupan (Azizah *et al.*, 2024).

Etika Barat sangat menekankan pentingnya logika, kebebasan, dan keadilan sebagai pilar moralitas. Rasionalitas dianggap sebagai alat untuk mencapai keadilan yang objektif dan universal. Sistem hukum modern di Barat dibangun berdasarkan prinsip logika dan argumentasi hukum, bukan atas dasar tradisi atau dogma agama. Kebebasan menjadi hak utama dalam beragam aspek kehidupan, seperti aspek politik, ekonomi, dan sosial. Penegakan keadilan dilakukan dengan mengacu pada hukum tertulis yang bersifat umum dan mengikat. Etika Barat juga menilai tindakan sebagai benar atau salah berdasarkan dampak terhadap kebebasan dan hak orang lain. Dalam sistem pendidikan, anak-anak diajarkan untuk berpikir kritis dan mempertanyakan nilai-nilai yang ada. Kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab pribadi merupakan nilai moral penting dalam budaya ini. Diskusi terbuka dan debat merupakan cara utama untuk mencapai kesepakatan moral yang adil. Dengan demikian, pendekatan logis dan sistematis menjadi karakter utama etika masyarakat Barat (Aji, 2024).

Dalam budaya Barat modern, etika tidak selalu bergantung pada ajaran agama, melainkan berdiri sendiri sebagai sistem rasional. Banyak pemikiran moral dikembangkan dalam kerangka sekuler yang memisahkan kehidupan moral dari kewajiban religius. Etika dipandang sebagai hasil dari konsensus sosial dan nalar manusia, bukan wahyu ilahi. Hal ini memungkinkan penerapan etika secara luas di masyarakat pluralistik yang memiliki latar belakang agama berbeda-beda. Dalam sistem sekuler, aturan moral dibentuk oleh hukum dan filsafat, bukan oleh dogma keagamaan. Meski nilai-nilai Kristen masih memengaruhi budaya Barat, praktik sosial dan politik umumnya bersifat netral secara agama. Moralitas bersumber dari hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan universal. Pemisahan antara gereja dan negara menjadi prinsip utama dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, individu bebas memilih sistem keyakinan pribadi, tanpa mempengaruhi hak moralnya di ranah publik. Etika rasional ini memperkuat objektivitas dan keadilan dalam masyarakat modern Barat (Solihin dan Anwar, 2024).

Budaya Barat sangat menjunjung tinggi kesetaraan dan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan sosial. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang, di hadapan hukum dan masyarakat mempunyai hak yang sama. Konsep kesetaraan ini mencakup hak politik, sosial, ekonomi, serta kebebasan sipil. Nilai-nilai ini dituangkan dalam beragam deklarasi internasional contohnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam praktiknya, negara-negara Barat membangun institusi demokrasi yang menjamin hak-hak tersebut melalui konstitusi dan sistem peradilan yang independen. Kesetaraan gender, perlindungan terhadap minoritas, dan kebebasan beragama menjadi fokus utama dalam kebijakan publik. Pendidikan dan media berperan aktif dalam membentuk kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Dalam budaya kerja, meritokrasi diterapkan untuk memastikan keadilan dalam kesempatan dan penghargaan. Nilai kesetaraan ini menjadi dasar kuat bagi pembangunan masyarakat inklusif dan

progresif. Oleh karena itu, budaya Barat menempatkan hak individu sebagai titik sentral dalam etika sosial (Putri *et al.*, 2023)

Penerapan nilai-nilai etika dan moral Barat dapat dilihat dalam sistem hukum dan sosial di Eropa dan Amerika. Di Eropa, banyak negara menganut hukum sekuler yang menempatkan rasionalitas sebagai dasar pengambilan keputusan hukum. Hak sipil dan kebebasan pribadi dilindungi oleh konstitusi dan lembaga peradilan yang independen. Sementara di Amerika Serikat, kebebasan berbicara dan berpendapat menjadi simbol utama dari sistem etika individualis. Setiap warga negara memiliki hak untuk mengekspresikan pandangannya tanpa takut represi. Sistem meritokrasi di Amerika juga menekankan pentingnya pencapaian individu berdasarkan kemampuan dan usaha pribadi. Lembaga pendidikan dan kerja menilai keberhasilan bukan dari latar belakang sosial, melainkan dari prestasi objektif. Budaya transparansi, debat publik, dan hak untuk menggugat hukum menunjukkan kekuatan sistem etika Barat. Perlindungan terhadap minoritas, kebebasan beragama, dan kesetaraan gender terus diperjuangkan sebagai bagian dari moralitas publik. Contoh-contoh ini mencerminkan nilai moral Barat yang menekankan kebebasan, keadilan, dan rasionalitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Perbandingan dan Analisis Kritis

1. Tabel Perbandingan Nilai Etika dan Moral Timur-Barat

Aspek	Budaya Timur	Budaya Barat
Sumber Nilai	Tradisi, agama (Islam, Hindu, Buddha, Konfusianisme), dan adat istiadat lokal	Rasionalitas, hukum positif, filsafat Yunani-Romawi, dan nilai Kristen sekuler
Orientasi Nilai	Kolektivisme; mendahulukan kepentingan kelompok di atas individu	Individualisme; menekankan hak dan kebebasan individu
Pengambilan Keputusan Moral	Berdasarkan norma sosial, pertimbangan kolektif, dan harmoni	Berdasarkan logika, prinsip keadilan, dan otonomi individu
Norma Sosial	Menjaga harmoni, keselarasan, dan stabilitas sosial	Menjaga keadilan, transparansi, dan kebebasan berekspresi
Peran Agama	Sentral dan mendasari moralitas dalam kehidupan sehari-hari	Cenderung terpisah; etika bersifat sekuler meskipun berakar dari agama
Struktur Sosial	Hierarkis, menghormati otoritas dan yang lebih tua	Cenderung egaliter dan menekankan kesetaraan
Relasi Sosial	Bersifat simbolik dan berbasis pada nilai kekeluargaan	Langsung dan terbuka, berbasis hak individu

Contoh Negara	Jepang (Bushido), Tiongkok (filial piety), Indonesia (gotong royong)	Eropa (sistem hukum sekuler), Amerika Serikat (kebebasan berbicara, meritokrasi)
---------------	--	---

Perbandingan nilai etika dan moral antara budaya Timur dan Barat dapat dilihat dari berbagai aspek penting. Dalam hal sumber nilai, budaya Timur banyak mengambil dari ajaran agama, filsafat spiritual, dan tradisi, sementara budaya Barat cenderung berpijak pada filsafat rasional, hukum positif, dan sekularisme. Orientasi sosial juga berbeda; budaya Timur lebih menekankan kolektivisme, sedangkan budaya Barat menjunjung tinggi individualisme. Dalam pengambilan keputusan moral, masyarakat Timur mempertimbangkan harmoni sosial dan norma tradisional, sementara Barat lebih mengedepankan prinsip keadilan dan kebebasan pribadi. Norma sosial di Timur didasarkan pada tata krama dan kepatuhan terhadap otoritas, sedangkan di Barat menekankan kesetaraan dan kebebasan berekspresi. Sistem hukum Barat bersifat formal dan rasional, sementara di Timur, norma adat dan konsensus sosial sering kali menjadi acuan moral. Dalam hal relasi sosial, Timur mengutamakan keselarasan dan penghormatan, sedangkan Barat lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat dan persaingan. Nilai religiusitas di Timur sangat kuat, berbeda dengan Barat yang memisahkan moralitas dari agama. Meskipun berbeda, keduanya memiliki nilai universal seperti kejujuran dan tanggung jawab. Dengan menyusun tabel perbandingan, pemetaan ini menjadi lebih jelas dan dapat menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut.

Baik budaya Timur maupun Barat memiliki keunggulan dan keterbatasan dalam pendekatan moral dan etikanya. Budaya Timur unggul dalam membangun stabilitas sosial melalui keselarasan, rasa hormat, dan nilai spiritual yang tinggi. Masyarakat Timur cenderung lebih terikat secara emosional, sehingga solidaritas kelompok lebih kuat. Namun, pendekatan ini bisa menekan kebebasan individu dan menghambat kreativitas karena kuatnya tekanan sosial. Sebaliknya, budaya Barat memberikan ruang luas bagi kebebasan, inovasi, dan perkembangan pemikiran individual. Nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan berbicara menjadi pondasi kuat dalam kehidupan sosial dan politik Barat. Akan tetapi, pendekatan Barat juga memiliki kelemahan, seperti kecenderungan individualistik yang dapat menyebabkan alienasi sosial. Kelebihan logika rasional di Barat kadang melupakan dimensi spiritual dan emosional yang penting dalam kehidupan. Dalam sistem Barat, hubungan antarmanusia bisa menjadi lebih fungsional daripada emosional. Sementara itu, Timur berisiko terjebak pada konservatisme dan resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, pemahaman kritis terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing budaya dapat membuka jalan untuk sintesis nilai yang lebih seimbang (Vliert *et al.*, 2023).

Perbedaan nilai etika dan moral di Timur dan Barat secara langsung memengaruhi perilaku sosial dan sistem hukum masyarakatnya. Di Timur, hubungan sosial dibangun atas dasar harmoni, rasa hormat, dan penghindaran konflik terbuka. Hal ini terlihat dari pentingnya konsep seperti *filial piety* di Tiongkok atau budaya sopan santun di Jepang. Dalam masyarakat Barat, interaksi sosial lebih terbuka dan rasional, sehingga perbedaan pendapat dianggap sebagai

bagian dari dinamika yang sehat. Sistem hukum di Barat disusun berdasarkan prinsip keadilan objektif dan aturan tertulis, sedangkan di Timur, hukum sering kali dipengaruhi oleh adat dan konsensus sosial. Dalam dunia kerja, masyarakat Timur menekankan kesetiaan dan tanggung jawab kelompok, sedangkan Barat lebih mengutamakan pencapaian individu dan meritokrasi. Etika bisnis pun berbeda: budaya Timur menghindari konfrontasi dan menjaga muka, sementara Barat lebih transparan dan langsung. Hubungan antarpersonal di Timur cenderung hirarkis, berbeda dengan Barat yang lebih egaliter. Semua perbedaan ini membentuk gaya hidup, cara berinteraksi, dan regulasi sosial yang unik di masing-masing budaya. Kesadaran akan hal ini penting untuk meningkatkan toleransi dalam konteks multikultural (Hung, 2023).

Dalam dunia global yang saling terhubung, perbedaan nilai etika antara Timur dan Barat dapat menimbulkan berbagai tantangan. Dalam diplomasi, pendekatan langsung ala Barat bisa dianggap ofensif oleh masyarakat Timur yang mengedepankan kehati-hatian dan kesantunan. Dalam dunia bisnis, gaya negosiasi yang cepat dan kompetitif dari Barat sering berbenturan dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis relasi dari Timur. Sistem pendidikan Barat yang bebas dan terbuka terkadang dianggap kurang disiplin oleh masyarakat Timur yang menghargai otoritas dan ketertiban. Konflik nilai juga terjadi dalam kebijakan internasional terkait HAM, di mana standar moral Barat tidak selalu cocok diterapkan di konteks budaya Timur. Media Barat yang menekankan kebebasan ekspresi sering kali dikritik oleh masyarakat Timur yang mengutamakan tanggung jawab sosial. Ketegangan juga muncul dalam dunia teknologi dan etika privasi, di mana pendekatan Barat cenderung individualistik sedangkan Timur lebih kolektif. Dalam isu gender, masyarakat Timur yang konservatif kadang menolak nilai-nilai liberal yang dianut Barat. Semua ini menunjukkan bahwa konflik nilai bukan hanya soal teori, tetapi berdampak nyata pada hubungan internasional. Oleh karena itu, diperlukan dialog lintas budaya untuk membangun pemahaman dan kompromi etis (Fleming *et al.*, 2021).

Meskipun terdapat perbedaan mendasar, saat ini banyak terjadi adaptasi silang budaya antara Timur dan Barat. Budaya kerja Jepang yang menekankan disiplin, loyalitas, dan kerja tim mulai diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di Amerika dan Eropa. Sebaliknya, prinsip meritokrasi dan efisiensi dari sistem Barat mulai diterapkan dalam korporasi besar di Asia. Dunia pendidikan di Timur juga mulai mengadopsi metode pembelajaran kreatif dan partisipatif dari Barat. Sementara itu, negara-negara Barat semakin mengakui pentingnya nilai spiritual dan keseimbangan hidup yang dijunjung dalam budaya Timur. Di ranah teknologi, inovasi dari Barat dipadukan dengan pendekatan kolektif dan holistik ala Timur dalam desain produk dan layanan. Budaya populer seperti *K-Pop* dan anime berhasil menembus pasar Barat, menunjukkan daya tarik nilai estetika dan kolektivisme Timur. Perusahaan multinasional kini mengembangkan pelatihan lintas budaya untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Adaptasi ini menunjukkan bahwa perpaduan nilai bisa menciptakan harmoni baru dalam kehidupan global. Proses ini tidak hanya memperkaya pemahaman budaya, tetapi juga membuka jalan menuju etika global yang lebih inklusif. Fenomena ini menjadi bukti bahwa pertukaran nilai tidak selalu harus berujung pada konflik, tetapi bisa saling memperkuat (Hirasaka *et al.*, 2021).

Implikasi Praktis

Kajian mengenai perbedaan nilai etika dan moral antara budaya Timur dan Barat memberikan kontribusi penting bagi pendidikan multikultural. Pemahaman mendalam terhadap karakteristik masing-masing budaya dapat mendorong tumbuhnya empati antarindividu lintas budaya. Dalam konteks sekolah dan universitas, pendidikan multikultural yang berlandaskan pada kesadaran nilai etika dan moral global dapat memperkuat toleransi dan saling pengertian. Peserta didik akan diajak memahami bahwa tidak ada satu sistem nilai yang lebih unggul, tetapi semua memiliki konteks dan fungsi sosial yang berbeda. Dengan mengenalkan perbedaan nilai sedari dini, siswa dapat lebih terbuka terhadap keberagaman dalam interaksi sosial. Hal ini juga dapat mencegah stereotip negatif dan prasangka antarbudaya yang kerap menjadi sumber konflik. Guru sebagai fasilitator juga dituntut untuk memahami keragaman ini agar pendekatan pembelajaran menjadi lebih inklusif. Dalam jangka panjang, pendidikan multikultural yang berbasis etika lintas budaya dapat menciptakan generasi yang berjiwa global. Nilai-nilai seperti keadilan, harmoni, kebebasan, dan tanggung jawab dapat diperkenalkan sebagai landasan bersama. Dengan demikian, kajian ini menjadi pijakan penting dalam mengembangkan sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap dunia yang semakin terhubung (Amarullah *et al.*, 2024).

Perbedaan nilai etika dan moral antara Timur dan Barat memiliki pengaruh signifikan terhadap hubungan diplomatik dan bisnis internasional. Dalam diplomasi, kesalahpahaman budaya seringkali memicu ketegangan yang seharusnya bisa dihindari dengan pemahaman nilai-nilai dasar masing-masing pihak. Misalnya, budaya Timur yang menekankan keharmonisan dan penghormatan dapat bertentangan dengan gaya komunikasi langsung dan terbuka dari Barat. Dalam dunia bisnis, hal ini terlihat dalam gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan, hingga strategi negosiasi. Kegagalan memahami nilai kolektivisme di budaya Timur dapat membuat perusahaan Barat tampak arogan, sebaliknya, pendekatan terlalu hierarkis bisa dianggap tidak efisien oleh perusahaan Barat. Maka dari itu, pemahaman lintas budaya menjadi aset penting dalam menjalin kemitraan internasional yang sukses. Banyak perusahaan multinasional kini memberikan pelatihan interkultural kepada karyawannya agar mampu menavigasi perbedaan nilai dengan bijak. Begitu juga dalam diplomasi, pemimpin yang peka terhadap etika budaya dapat membangun komunikasi yang lebih efektif dan saling menguntungkan. Kajian ini juga mendorong pentingnya etika global sebagai kerangka bersama dalam hubungan internasional. Dengan begitu, interaksi antarbangsa tidak hanya berlandaskan kepentingan ekonomi atau politik, tetapi juga pada penghargaan nilai dan integritas budaya masing-masing (Zreik, 2024).

Hasil kajian ini dapat menjadi fondasi penting dalam merancang kurikulum etika global yang inklusif dan representatif. Etika tidak seharusnya diajarkan sebagai sistem nilai tunggal yang universal, melainkan sebagai dialog antara berbagai tradisi moral dunia. Kurikulum etika global harus mencakup perspektif Timur dan Barat secara seimbang agar siswa memahami keberagaman pendekatan moral yang ada. Konsep-konsep seperti kolektivisme, hierarki, dan spiritualitas dari Timur perlu diajarkan berdampingan dengan individualisme, kesetaraan, dan rasionalitas dari Barat. Hal ini akan membekali siswa dengan

kemampuan berpikir kritis terhadap nilai-nilai yang mereka anut, sekaligus menghargai nilai orang lain. Pendidikan etika global juga akan menciptakan ruang diskusi yang sehat dan memperluas cakrawala pemikiran peserta didik. Kurikulum yang demikian akan sangat relevan di dunia global yang menuntut kolaborasi antarbudaya. Penerapannya dapat dilakukan sejak tingkat menengah hingga pendidikan tinggi dengan materi studi kasus dari berbagai negara. Guru dan dosen juga dapat melibatkan metode pengajaran yang dialogis dan reflektif untuk menggali perspektif nilai dari beragam latar belakang. Dengan kurikulum yang terintegrasi secara global, pendidikan etika akan menjadi wahana membentuk warga dunia yang bertanggung jawab dan beretika tinggi (Papadoupoulou *et al*, 2022).

Perbedaan etika dan moral antara Timur dan Barat juga berimplikasi pada pola pengasuhan anak, pembentukan hukum, dan tata kelola organisasi internasional. Dalam pengasuhan, budaya Timur cenderung menanamkan kepatuhan, penghormatan terhadap orang tua, dan pentingnya menjaga keharmonisan. Sebaliknya, budaya Barat lebih menekankan kemandirian, kebebasan berekspresi, dan pembentukan identitas individu sejak dini. Pola ini membentuk cara pandang generasi muda terhadap otoritas, tanggung jawab, dan makna sukses. Dalam sistem hukum, perbedaan nilai ini tercermin dalam hukum yang berbasis norma adat dan religius (di Timur) versus hukum positif dan sekuler (di Barat). Organisasi internasional seperti PBB, WHO, atau UNESCO juga menghadapi tantangan dalam menyatukan prinsip-prinsip etis yang seringkali berasal dari latar budaya yang berlawanan. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan global harus mempertimbangkan sensitivitas nilai agar dapat diterima secara luas. Kajian ini menunjukkan perlunya dialog etis lintas budaya dalam menyusun konsensus bersama. Selain itu, nilai-nilai dari kedua budaya dapat saling memperkaya dan menjadi referensi bagi solusi moral yang lebih inklusif. Dengan pengakuan dan pemahaman terhadap karakteristik masing-masing, sistem global dapat lebih adil dan efektif dalam menjawab tantangan masa kini (Nasution *et al.*, 2023).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa nilai moral dan etika tidak bersifat universal sepenuhnya, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks budaya masing-masing masyarakat. Budaya Timur cenderung mendasarkan etika pada agama, tradisi, dan harmoni sosial, sementara budaya Barat lebih menekankan rasionalitas, hukum, dan kebebasan individu. Perbedaan ini menimbulkan perlunya dialog antarbudaya untuk membangun pemahaman bersama dan pendekatan yang inklusif dalam menyusun etika global. Pendekatan tersebut penting dalam pendidikan multikultural, diplomasi, bisnis internasional, serta pengembangan kurikulum etika yang sensitif terhadap keberagaman. Kajian lanjutan direkomendasikan dalam bentuk penelitian empiris lintas budaya agar memperoleh data nyata terkait implementasi nilai moral di berbagai masyarakat. Selain itu, analisis kasus konflik nilai seperti isu LGBTQ atau kebebasan berekspresi juga penting untuk memahami dinamika etika kontemporer. Disarankan pula penelitian tentang etika profesional dalam bidang kedokteran dan

bisnis, mengingat adanya perbedaan pendekatan signifikan antara Timur dan Barat. Kajian ini diharapkan dapat mendorong penyusunan kebijakan global yang adil dan kontekstual. Dengan pemahaman lintas budaya yang lebih dalam, masyarakat global dapat membangun sistem nilai yang saling menghormati. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yang menuntut kerja sama lintas budaya.

KONFLIK KEPENTINGAN

Terkait penganalisisan, kepenulisan, dan penerbitan makalah ini, penulis tidak melaporkan adanya potensi konflik kepentingan.

REFERENSI

- Abdullah, A., Al-Ghazali A., & Kant. (2002). *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Mizan.
- Adi, S. S. (2021). *Pemahaman Lintas Budaya*. Malang: Media Nusa Creative.
- Aji, W. T. (2024). *Etika Politik Franz Magnis Suseno*. Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma.
- Alamin, T. (2021). Pola Harmoni Sosial Masyarakat Mataraman Di Kota Kediri. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 5(2), 137-162.
- Amarullah, R. Q., Ruslandi, R., Fadilah, R. M. Y., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2024). Effective Multicultural Education Strategies to Enhance Tolerance in Indonesian Schools. *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 9(1), 142–151. <https://doi.org/10.15575/ath.v9i1.28123>
- Andini, S. D. (2022). Universalisme dan Relativisme Budaya dalam penegakan HAM Terhadap kasus Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2), 332.
- Arrafi, M. A., Aditya, M. A., Fahlifi, M. S., Ramadhani, Z. R., & Rohman, R. F. (2023). Etika, moral, dan akhlak. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(2), 538-549.
- Azizah, A. N., Shupaeroh H. Y., Trisyahrani M. R., Lestari, P. G., Hotijah S., Al-Adawiyah R., & Yatri I. (2024). Peraan budaya rasa malu dan rasa bersalah dalam pendidikan karakter di sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 2049-2063.
- Bagus, L. (2005). *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Blackburn, S. (2013). *Kamus Filsafat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bernanda, A. W., & Wakhudin, W. (2023). Memperkokoh Keharmonisan Umat Beragama Antara Konghucu dengan Umat Beragama Lain. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(3), 372-378.
- Dzulfikri Azis Muthalib, S. E., Sesario, R., S Hut, M. M., Sutaguna, I. N. T., Par, S. S. T., Par, M., Sonani, N., MM, S. E., Ali, I. H., & Latiep, I. F. (2023). *Etika profesi dalam dunia bisnis*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Efendi, J. (2021). *Pembentukan Karakter Anak Sejak Usia Dini di PAUD*. Jakarta: lppm kemendikbud.
- Fadliana, N. A. N., Sukardi, I., & Astuti, M. (2024). Falsafah Pendidikan Timur: Konfusianisme, Hindu-Buddha, dan Islam. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 2463-2471. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1683>

- Fautanu, I. (2012). *Filsafat Ilmu Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Referensi.
- Febriyanti, N., & Dewi D. A. (2021). Pengembangan nilai moral peserta didik dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 476-482.
- Fleming, P., Bayliss, A. P., Edwards, S. G., & Seger, C. R. (2021). The role of personal data value, culture and self-construal in online privacy behaviour. *PloS one*, 16(7), e0253568. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253568>
- Graham, G. (2014). *Teori-Teori Etika*. Bandung: Nusa Media.
- Himmawan, D., Rizky, WR, Ningsih, YA, & Putrawan, F. (2024). Akhlak, Etika dan Akhlak dalam Pandangan Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. *Aslama: Jurnal Studi Islam*, 1(4), 132-139.
- Hirasaka, M., Kusaka, Y., & Brogan, J. (2021). Japanese style management in eras of change: new management model. *SN business & economics*, 1(6), 85. <https://doi.org/10.1007/s43546-021-00087-0>
- Hung, AH-C. (2023). Kesalahan Anak dalam Berbagai Sistem Hukum: Menganalisis Pengaruh Budaya Hukum Tradisional Tiongkok terhadap Properti di Hong Kong, Taiwan, dan Tiongkok. *Jurnal Hukum Perbandingan Asia*, 18 (2), 137–157. doi:10.1017/asjcl.2023.6
- Ji, L. J., Johnston T. I. V., Zhang ., Jacobson J. A., Zhang N., & Huang X. (2021). Contextual and cultural differences in positive thinking. *Jurnal of Cross-Cultural Psychology*, 52(5), 449-467.
- Kami, K., & Bili, M. (2025). Kajian Linguistik Antropologi terhadap Istilah Kekerabatan dalam Bahasa Wewewa Sumba Barat Daya. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(1), 1584-1593.
- Kant, I., & Abdullah S. (2017). *Kritik Atas Akal Budi Murni*. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Kusumastuti, Juliardi B., Sumilih D. A., Andriani N., Lubis S. H., Novra E., Oktaviani E., Thahura F., Jubaeli A., Milia J., Masluddin, Laksono R. D., Tukhid, & Syafitra V. (2025). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Sumedang : CV. Mega Press Nusantara.
- Kristanti, D., Kardini, N. L., Sucandrawati, N., Alaslan, A., Harto, B., Hidayati, M., Ashriana, A. N., Irawan, B., & Astari, A. A. E. (2023). *Etika bisnis*. Padang: Global Eksekutif Teknologi
- Mu'thi, M., & Abdul, E. (2023). *Penerapan Pembelajaran Akhlak Mulia dalam Meningkatkan Rasa Kebajikan di MTs NU Joho Pace Kabupaten Nganjuk* (Disertasi Doktor, IAIN Kediri).
- Nasution, E. S., Santoso T., Marlina, Rosmalinda. (2023). Implementation of Legal Culture toward Law Enforcement of Child Trafficking (Comparative Study of Indonesia and Australia). *ULJLS: Ultimate Journal of Legal Studies*, 1(1), 1–12
- Papadopoulou, K., Palaiologou, N., & Karanikola, Z. (2022). Insights into Teachers' Intercultural and Global Competence within Multicultural Educational Settings. *Education Sciences*, 12(8), 502. <https://doi.org/10.3390/educsci12080502>

- Putri, A. C. T., Asriani, D., & Aptari, I. I. (2023). Konsepsi Hukum Pancasila Dalam Ranah Hak Asasi Manusia (Ham) Dan Implementasi Hukumnya. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 315-324.
- Rahman, A., & Maulana M. F. R. (2023). Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam Perspektif Etika dan Filsafat Manusia. *Journal of Society and Development*, 3(2), 53-64.
- Rizki, M. (2024). Nilai-nilai Filantropi Spiritual Pemikiran Raja Ali Haji dalam Konteks Transformasi Sosial (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Rosita, G. O., Ariffianto, M. U., & Abadi, M. T. (2024). Sejarah pemikiran ekonomi klasik. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 368–376.
- Safudin, E., Baihaqi, A., Syakirin, A., Imtihanah, A. H., Kususiyanah, A., Pahlevi, F. S., & Abdullah, F. (2022). *Memahami teori hukum: Percikan pemikiran ilmu hukum lintas mazhab*. Q Media.
- Silalahi, U. P. C. (2025). Aristoteles Tentang Karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(1), 181-189.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press
- Suastra, W., Atmaja, A. W. T., & Tika, I. N. (2024). Dialog Antara Filsafat Pendidikan Barat Dan Nilai Budaya Timur Dalam Pembentukan Karakter Siswa. *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(01), 1453-1464.
- Solihin, M., & Anwar, M. R. (2024). *Akhlak tasawuf: manusia, etika, dan makna hidup*. Nuansa Cendekia.
- Suseno, F. M. (1997). *13 Tokoh Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Vliert, E. V., Pelham B., & Vandello J. A. (2024). East–West beliefs challenged by North–South evidence about collectivism versus individualism. *Journal of Enviromental Psychology*, 101, 102498. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2024.102498>
- Wardani, D. K., & Nurainun'nisa, N. N. (2024). Analisis Perilaku Kecurangan Akademik Pada Mahasiswa Akuntansi Menggunakan Konsep Budaya Hofstede. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 20(1), 44-58.
- Yu, F., Zhao Y., Yao J., Briamonte M. F., Profita S., & Liu Y. (2022) Understanding East–West Cultural Differences on Perceived Compensation Fairness Among Executives: From a Neuroscience Perspective. *Frontiers in Psychology*, 12:815641. doi: 10.3389/fpsyg.2021.815641
- Zreik, M. (2024). The influence of Chinese cultural values on negotiation tactics and conflict resolution strategies in international relations: an ethnographic study. *Psychology Research on Education and Social Sciences*, 5(3), 81–90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13881357>